BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait langkah diplomasi Muhammadiyah di tengah pusaran konflik Mindanao Filipina Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa melalui langkah-langkah; menciptakan kepercayaan bersama (*mutual confidence*), berupaya untuk mencari kejelasan masalah, menciptakan saling pengertian (*mutual understanding*), mendorong para pihak untuk menyusun dan menyepakati prioritas urutan masalah dan memahami tingkat krusialitasnya, dan berupaya untuk melaksanakan penyelesaian masalah, Muhammadiyah telah berhasil menghantarkan pihak-pihak yang berkonflik pada kesepakatan damai *Framework of Agreement* 2012. Apabila dilihat dari sejarah konflik Mindanao yang sudah sangat panjang, keberhasilan diplomasi Muhammadiyah ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan dalam upaya perdamaian di Mindanao.

1. Konflik Mindanao

a) Sejarah Konflik

Sejarah konflik Mindanao berawal sejak datangnya kolonial Spanyol yang ingin meluaskan wilayah kolonialisasinya ke bagian selatan Luzon. Selanjutnya konflik antara Bangsa Moro dan Pemerintah Filipina berawal

dari Kemerdekaan Negara Filipina, dimana Pemerintah Filipina selalu menerapkan diskriminasi bagi Bangsa Moro di Mindanao.

b) Internasionalisasi Konflik

Internasionalisasi konflik Mindanao dipilih oleh sebagian besar elite Bangsa Moro di Mindanao sebagai bentuk meminta bantuan kepada dunia internasional dan terkhusus kepada dunia Islam dalam upaya meresolusi konflik Mindanao.

c) Kegagalan Penyelesaian Konflik

Kesepakatan damai yang telah gagal mulai dari *Tripoli Agreement* 1976, *Jeddah Accord* 1989, dan *Final Peace Agreement* 1996 diakibatkan tidak diikut sertakannya elemen aktor masyarakat Mindanao dan aktor non negara dalam mengawal proses perdamaian tersebut.

d) Keterlibatan *International Contact Group* (ICG)

Dari banyaknya serangkaian kesepakatan damai yang gagal, menyebabkan dibentuknya *International Contact Group* (ICG). ICG merupakan badan *ad-hoc* yang terdiri dari beberapa Negara seperti Inggris, Saudi Arabia, Jepang, dan Turki serta beberapa *non government organization* seperti Muhammadiyah, *Human Conciliation*, *Asia Foundation* dan *Henry Dunant Center*.

e) Tercapainya *Framework of Agreement* 2012

Keterlibatan *International Contact Group* (ICG) dalam penyelesaian konflik Mindanao, akhirnya memberikan hasil berupa disepakatinya *Framework of*

Agreement 2012 antara Pemerintah Filipina dan MILF yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Malacanang pada tanggal 15 Oktober 2012.

2. Langkah Diplomasi Muhammadiyah

a) Menciptakan Kepercayaan Bersama (*Mutual Confidence*)

Muhammadiyah dalam menciptakan kepercayaan bersama terhadap pihak-pihak yang berkonflik adalah dengan cara Muhammadiyah memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dalam sebuah meja perundingan.

b) Berupaya untuk Mencari Kejelasan Masalah

Upaya Muhammadiyah dalam mencari kejelasan masalah yang terjadi di Mindanao adalah dengan cara Muhammadiyah mengirimkan satu tim *scoping mission* ke Filipina pada tanggal 12-21 Juni 2011.

c) Menciptakan Saling Pengertian

Usaha Muhammadiyah dalam menciptakan saling pengertian kepada pihak-pihak yang berkonflik adalah dengan cara Muhammadiyah melakukan kegiatan-kegiatan perundingan, dimana para pihak yang berkonflik diundang untuk berdialog satu sama lain. Selain itu pula, Muhammadiyah mencoba mentransfer pemikiran Kosmopolitan Muhammadiyah, dimana ini sebagai jembatan untuk terciptanya saling pengertian di setiap pihak yang terlibat konflik.

d) Mendorong Para Pihak untuk Menyusun dan Menyepakati Prioritas Urutan Masalah dan Memahami Tingkat Krusialitasnya

Dalam menyusun dan menyepakati prioritas urutan masalah dan memahami tingkat krusialitasnya. Telah disusun *Framework of Agreement*, dimana kesepakatan tersebut disusun dan disepakati oleh Pemerintah Filipina dan MILF berdasarkan prioritas dari urutan masalah yang berkembang dalam konflik Mindanao. Item-item kesepakatan tersebut dipilih karena item-item tersebut sesuai dengan tingkat krusialitas yang harus segera dilaksanakan dalam mencapai perdamaian di Mindanao.

e) Berupaya untuk Melaksanakan Penyelesaian Masalah

Upaya dalam Melaksanakan Penyelesaian Masalah yang telah disepakati dalam *Framework of Agreement*, maka kini telah dibentuk *Transitional Committee*, *Third Party Monitoring Team* (TPMT) dan *International Monitoring Team* (IMT). Muhammadiyah pula ikut andil untuk melaksanakan penyelesaian masalah tersebut dengan telah membuat *humanitarian road map* Muhammadiyah 2011-2021.

3. Problematika Diplomasi Muhammadiyah

Problematika yang dihadapi Muhammadiyah terkait dengan diplomasinya adalah dalam menghadapi kompleksitas kepentingan antar aktor, baik yang berkonflik maupun yang mencoba untuk menyelesaikan konflik. Selain itu terkait masalah otoritas, belum terbentuknya perwakilan Muhammadiyah di Mindanao, dan permasalahan finansial Muhammadiyah terkait organisasi non profit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang peneliti berikan adalah :

1. Agar hasil *Framework of Agreement* dapat di jalankan dengan baik, maka Muhammadiyah harus mengawal kegiatan *Framework of Agreement* itu di lapangan dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik Mindanao. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, Muhammadiyah dapat menggunakan media-media dalam menunjang pengawalan dan menjalin hubungan baik tersebut, seperti media internet (*teleconference, skype*, dan lain sebagainya). Selain itu, pengawalan ini dimaksudkan pula agar setiap kepentingan aktor yang tak sesuai dengan isi kesepakatan dapat dicegah.

2. Dalam menghadapi kompleksitas kepentingan setiap aktor, maka diperlukan perjanjian kesepahaman yang menyatakan komitmen untuk tidak akan mencampurkan kepentingan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan *Framework of Agreement* 2012 secara tertulis dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berlaku selama pemberlakuan *Framework of Agreement* 2012. Dimana perjanjian ini melibatkan semua pihak baik yang berkonflik maupun yang membantu penyelesaian konflik. Perjanjian ini diterapkan sampai benar-benar terbentuknya wilayah otonomi Bangsa Moro di Mindanao. Dengan perjanjian ini diharapkan dapat mencegah kepentingan-kepentingan setiap aktor tersebut.

3. Muhammadiyah harus dapat mengawal dan membantu dalam melobi Kongres Filipina (semacam DPR) untuk mengamandemen Konstitusi

Filipina yang tidak mengizinkan adanya Pemerintahan Otonom yang terlepas dari Pemerintah Pusat. Bantuan yang Muhammadiyah lakukan yaitu dengan cara Muhammadiyah menerjunkan pakar-pakarnya di bidang hukum, untuk dapat membantu dalam penyusunan hukum dasar yang akan dijadikan sebagai rujukan perundang-undangan di wilayah Mindanao. Tanpa adanya amandemen konstitusi ini, maka perjanjian damai tersebut akan gagal kembali diterapkan dilapangan.

4. Pembentukan perwakilan Muhammadiyah di Mindanao sebaiknya harus cepat dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan terlebih dahulu rumah warga Mindanao untuk pembentukan sekretariat sementara di sana. Pembentukan ini dimaksudkan agar kedepan Muhammadiyah dapat dengan cepat merespon segala sesuatu yang terjadi di lapangan berkaitan dengan proses pemberlakuan kesepakatan perdamaian tersebut. Selain itu, dengan adanya pihak langsung dari Muhammadiyah yang ada di sana, apabila ada informasi yang belum dapat dipercaya, Muhammadiyah akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dari anggota perwakilan Muhammadiyah di Mindanao tersebut.

5. Permasalahan finansial terkait kegiatan diplomasi Muhammadiyah, dapat diatasi dengan cara meminta bantuan kepada amal usaha Muhammadiyah seperti; Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Rumah Sakit Muhammadiyah, Sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Serta dengan banyaknya warga Muhammadiyah di Indonesia, Muhammadiyah dapat meminta bantuan kepada warga Muhammadiyah seluruh Indonesia dengan

cara membuka rekening khusus terkait kegiatan penyelesaian masalah konflik Mindanao, dimana informasi ini disampaikan kepada setiap pimpinan daerah Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

6. Keberhasilan Muhammadiyah dalam meresolusi konflik Mindanao Filipina Selatan, dapat dijadikan sebagai referensi bagi Muhammadiyah atau *Non Government Organization* (NGO) yang berbasis islam lainnya (Seperti : Nahdatul Ulama, Hizbuz Tahrir, dll) untuk dapat meresolusi konflik-konflik di negara-negara yang masih belum damai. Seperti Palestina, dan lain sebagainya.